

Info tambahan

Accra Caucus on Forests and Climate Change yang terdiri dari gabungan lebih dari 100 organisasi masyarakat sipil dan masyarakat adat dari negara maju dan berkembang, dengan fokus pada isu kehutanan dalam perubahan iklim, khususnya REDD, berpendapat bahwa teks mengenai REDD+ yang dikeluarkan SBSTA di perundingan Durban ini gagal melindungi hutan dan masyarakat yang bergantung pada hutan dari resiko kerusakan dan pelanggaran HAM.

Draft yang saat pada saat ini tidak berhasil menentukan panduan pelaporan untuk safeguard sosial dan lingkungan yang sangat dibutuhkan untuk mengawal pelaksanaan REDD+ di negara-negara berkembang. Pesan-pesan para pemimpin dunia dan kelompok bisnis di Durban yang lebih menekankan keuntungan dari pasar karbon membawa resiko yang sangat besar bukan saja pada pengurangan emisi global tapi juga pada masyarakat yang tinggal di dalam dan di sekitar kawasan hutan, yang keselamatannya bergantung pada pelaksanaan safeguard dalam skema REDD+.

Tanpa adanya panduan pelaporan di tingkat internasional, terutama mengenai partisipasi masyarakat adat dan lokal, resiko bahwa laporan mengenai penegakkan safeguard akan dimonopoli pemerintah terbuka lebar. Selain itu, keputusan ini tidak memberi insentif bagi

pemerintah di tingkat nasional untuk melindungi masyarakat adat dan lokal yang bergantung pada hutan secara lebih baik.

Pemerintah Indonesia tidak berperan dalam mendorong pentingnya panduan mengenai pelaporan safeguard di tingkat internasional ini. Ancaman ini semakin besar di tengah semakin dekatnya Indonesia dengan skema pasar karbon yang lebih berorientasi bisnis daripada penyelamatan hutan dan pemenuhan hak-hak masyarakat yang tinggal di dalam dan di sekitar hutan.